

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Acuan Teori

1. Manajemen Kurikulum

a. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen dikemukakan Parker adalah Seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done through people). (Usman 2011:5) Sufyarma mengutip dari Stoner mengatakan: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Sufyarma 2004:188)

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata “manus” yang berarti tangan dan “agree” yang berarti melakukan. (Syarbini 2013) Pendapat lain, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sedangkan kata management berasal dari akar kata to manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. (Shadily 2007:462)

Menurut Howard M. Carlise dalam Deden Maqbullah bahwa manajemen adalah proses mengarahkan, mengoordinasikan, dan mempengaruhi operasional organisasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan, serta meningkatkan performa organisasi secara keseluruhan. (Maqbullah 2011:39) Manajemen menurut istilah sering didekatkan dengan istilah administrasi, karena memang antara manajemen dengan

administrasi mempunyai lahan yang sama dan hanya berbeda dalam pembagian tugasnya. Apabila administrasi berbicara tentang hal-hal makro maka manajemen bicara tentang hal-hal yang mikro. Artinya, ruang lingkup administrasi lebih luas sedang manajemen agak terbatas. Dalam formulasi yang konkrit dapat digambarkan bahwa administrasi menentukan arah kebijakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen mempunyai tugas mengatur bagaimana cara dan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. (Kayo 2007:17)

Menurut Henry L Sisk dalam bukunya "*Principles of Management*" disebutkan "*Management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives*". (Sisk 1969:6) Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada perkembangannya, istilah manajemen sering kali disamakan artinya dengan istilah administrasi. Hal tersebut bisa dimaklumi, mengingat dalam praktiknya, manajemen dan administrasi saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. (Jaja Jahari 2013:3)

- 1) Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan pada berbagai organisasi untuk membantu manajer memecahkan masalah organisasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, manajemen juga dapat diterapkan di bidang kesehatan untuk membantu para manajer organisasi untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan masyarakat. (Satrianegara 2012:26)
- 2) Manajemen adalah pengkoordinasian penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, bahan/material, dan uang); input manajemen terdiri dari tugas, rencana dan program.

3) Manajemen adalah aktivitas yang prinsip untuk membuat suatu perbedaan dalam hal bagaimana organisasi lebih baik melayani orang yang telah dipengaruhi oleh mereka, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang memuaskan, maka hal itu tergantung pada keluasan tingkat manajemen. Selanjutnya, bila manajer melakukan pekerjaan dengan baik maka mungkin organisasi akan mencapai tujuannya sesuai yang di inginkan. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik ada dua hal yang penting diketahui yaitu; pertama, kinerja manajemen dalam mempertentangkan dan menganalisis hal-hal yang membingungkan, dan kedua, kinerja organisasi; yaitu mengukur bagaimana organisasi mengerjakan pekerjaan dengan baik. (Maisah 2013:2)

4) Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsifungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya terbaiknya melalui tindakantindakan yang telah diterpakna sebelumnya. Sedangkan manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangible*). Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Ada wadah pengetahuan tentang manajemen yang terorganisir; ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Perhatian mulai diberikan kepada masalah-masalah organisasi, penggunaan waktu secara efektif dan pengendalian anggaran. (Terry 2006:9)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan

segala upaya di dalam mencapai tujuan organisasi. Agar bisa tercapai hasil yang optimal, maka segala sesuatu perlu adanya manajemen.

Studi tentang manajemen kurikulum dewasa ini dianggap menepati bagian terpenting dalam studi pengembangan kurikulum dan administrasi pendidikan. Hal ini wajar, sebab kurikulum adalah komponen yang penting dan merupakan alat pendidikan yang sangat vital dalam kerangka sistem pendidikan. Itu sebabnya, setiap institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, harus memiliki kurikulum yang sesuai dan serasi, tepat dengan kedudukan, fungsi dan peranan serta tujuan lembaga tersebut.

Manajemen pengembangan kurikulum pada dasarnya berkaitan dengan studi administrasi pendidikan, dimana fungsi supervisi telah tercakup didalamnya. Untuk memudahkan kita melakukan penelitian yang cukup mendalam dalam bidang manajemen kurikulum maka ada baiknya kita kembali ke fungsi-fungsi manajemen, yakni: perencanaan, pelaksanaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Fungsi-fungsi lainnya seperti: pengorganisasian, pengerakan motivasi, koordinasi, pembiayaan dan material, yang kemudian dimasukkan ke dalam fungsi pokok-pokok diatas secara komprehensif.

Dalam ruang lingkup yang luas definisi kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis diberikan kepada santri di bawah tanggung jawab pesantren untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Karena kurikulum.

Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap santri. Oleh karena begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. Yang perlu

ditekankan di sini adalah bahwa kurikulum bukanlah sekedar dokumen yang dicetak atau distensil. Untuk mengetahui kurikulum pesantren belum cukup hanya mempelajari pelajarannya, tetapi juga perlu mempelajari apa yang terjadi di pesantren, dalam kelas, kegiatan-kegiatan di lapangan olah raga atau di aula, dan sebagainya.

Pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar santri bukanlah suatu proses yang sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai; sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Persoalan inilah yang kemudian membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang kemudian kita namakan asas-asas atau landasan pengembangan kurikulum.

Proses pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen, berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen, atau berdasarkan proses manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, dan tindak lanjut kurikulum.

Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya, hingga membentuk siklus.

b. Definisi Kurikulum

Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olah raga yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dari start sampai ke finish. Namun lambat laun pengertian ini digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam Muija adalah kurikulum diistilahkan dengan manhaj, yaitu jalan yang terang, atau jalan yang terang yang dilalui manusia pada kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang diikuti oleh guru dan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai kependidikan. (Addaroini 2020:189)

Kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Kurikulum diartikan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup dan urutan isi, serta proses pendidikan. (Aly 1999:161)

Kemudian dalam dunia pendidikan istilah kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh anak atau peserta didik guna memperoleh ijazah atau menyelesaikan pendidikan. (Pratt 1980:4) Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni “*Curriculae*”, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh santri yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Menurut Robert Zaiz yang dikutip Asnawan “*curriculum is a resource of subject matters to be mastered*” atau kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Sedangkan Ronald Doll mengemukakan bahwa kurikulum adalah *All the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school*” atau kurikulum adalah semua pengalaman yang disajikan kepada santri di bawah naungan atau

bimbingan pesantren /Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru . (Asnawan 2018:146)

William B. Ragan yang dikutip Hamdan mengartikan kurikulum sebagai *“the experiences of childler for which the school accepts respobility”* atau kurikulum adalah segala pengalaman santri di bawah naungan tanggung jawab pesantren /Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru . Pendapat William B. Ragan di atas, nampak bahwa yang namanya kurikulum menyangkut seluruh aspek, aktivitas dan pengalaman peserta didik yang berada di bawah tanggung jawab pesantren , tanpa membedakan apakah kurikulum tersebut bersifat intra atau ekstra kurikuler semuanya merupakan kurikulum atau dalam artian untuk mencapai tujuan pendidikan di pesantren . (Hamdan 2014:04)

Dengan menempuh suatu kurikulum, santri dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa santri telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. (Oemar Hamalik 2007:16)

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum menjadi landasan berpijak suatu lembaga pendidikan untuk melangkah lebih jauh mengembangkan ciri khas suatu lembaga pendidikan dengan corak dan warna yang berbeda tergantung latar belakang lembaga tersebut. Apabila suatu lembaga pendidikan bernafaskan Internasional maka kurikulum yang disusun pun harus mengedepankan daya saing internasional, apabila suatu lembaga pendidikan bernafaskan Islam maka dapat dipastikan kurikulum yang

dibentuk juga akan terkontaminasi bahkan sengaja memasukkan muatanmuatan agama sebagai konsekuensi dari kekhususan suatu lembaga. Antara tujuan pendidikan Islam dengan program (kurikulum) merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hal ini disebabkan karena suatu tujuan yang hendak dicapai haruslah terlukiskan di dalam program (kurikulum), bahkan program itulah yang akan mencerminkan arah dan tujuan yang diinginkan dalam proses kependidikan.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa manajemen kurikulum adalah pengelolaan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Rahmat Hidayat 2016:85) Kemudian kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik tentang kemampuan yang harus dimiliki, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam pengalaman sehari-hari, sering didengarkan istilah fungsi. Fungsi membawa akibat pada adanya hasil. Jika sesuatu itu berfungsi maka berakibat pada adanya hasil. kurikulum pesantren memiliki fungsi yang utama yakni, sebagai pedoman untuk pendidik dalam membimbing para santrinya mengarah kepada tujuan utama pendidikan Islam dengan melalui pengetahuan, keterampilan, dan akhlak guna menjadi manusia ulul albab dengan melaksanakan kurikulum yang tersusun sistematis dan terencana. (Iin Khozainul Khoiriyah dkk 2020:29)

Fungsi kurikulum berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dan mengarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Dakir beberapa komponen dalam kurikulum yang harus menunjukkan arah pada pencapaian tujuan pendidikan adalah :

- 1) Perencanaan yang telah disusun,
- 2) Komponen materi yang telah direncanakan,

- 3) Metode/cara yang telah dipilih
- 4) Penyelenggara pendidikan dalam fungsinya melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dengan adanya 4 komponen tersebut, kegiatan pembelajaran bisa lebih tertata dan terencana sehingga dapat memperoleh hasil Pendidikan Islam yang maksimal. Pendidik bisa merencanakann apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didik. Menurut Abudin Nata Kurikulum Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang berbeda dan lebih khusus yaitu sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan mendorong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kata lain orientasi kurikulum Pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja, juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat, tidak hanya mengembangkan segi-segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, melainkan juga pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang. (A. Nata 2016:113)

Dari penejelasan diatas kita memahami bahwa kurikulum sangat penting dalam Lembaga Pendidikan, karena kurikulum menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang menunjang potensi peserta didik yang dimiliki oleh suatu Lembaga. Selain itu, dengan adanya kurikulum, kita dapat mengetahui pemahaman seperti apa yang akan diarahkankan atau diimplementasikan kepada peserta didik agar sesuai dengan tujuan didirikannya suatu Lembaga Pendidikan.

Dalam mengimplementasikan kurikulum, harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar hasilnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam melaksanakan kurikulum kita bisa mengembangkannya sesuai dengan zaman yang ada. Dalam mengimplementasikan kurikulum, kita juga harus bisa memahami situasi

yang ada, baik itu dari diri kita, Lembaga Pendidikan, peserta didik, maupun lingkungan sekitar.

Menurut Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin Manajemen kurikulum ini memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- 2) Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada santri untuk mencapai hasil yang maksimal; kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integratis dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- 4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas santri dalam mencapai tujuan pembelajaran; dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas santri dalam belajar.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar; proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun santri selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum; kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi

bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. (A. S. Nurdin 2009)

Secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum di atas perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum tersebut. Di antara langkah-langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan/ pesantren adalah melalui empat tahap, yaitu (a) perencanaan; (b) pengorganisasian; (c) implementasi; dan (d) evaluasi.

1) Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. (Oemar Hamalik 2009:171) Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajar, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. santri dengan karakteristik tersebut memiliki dua kemungkinan; meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau terjun ke dunia kerja serta masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan komponen perencanaan kurikulum sedikitnya harus memperhatikan 5 (lima) faktor berikut ini yaitu:

- a) Tujuan; merupakan perumusan tujuan belajar yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan santri sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pesantren harus berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.
- b) Konten (isi kurikulum); merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang

meliputi bahan kajian seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Secara khusus pemilihan isi kurikulum harus menekankan pada pendekatan mata pelajaran (pengetahuan) atau pendekatan proses (keterampilan). Untuk itu dalam pemilihan isi kurikulum harus terdapat kriteria yang mencakup:

- 1) Signifikansi, yaitu seberapa penting isi kurikulum tersebut dipelajari;
 - 2) Validitas, yaitu berkaitan dengan keotentikan dan keakuratan isi kurikulum tersebut;
 - 3) *Utility*, yakni berkaitan dengan kegunaan isi kurikulum dalam mempersiapkan santri menuju kehidupan dewasa;
 - 4) *Learnability*, yakni kemampuan santri dalam memahami isi kurikulum tersebut;
 - 5) Minat, yaitu berkaitan dengan minat santri terhadap isi kurikulum tersebut.
- c) Aktivitas belajar; merupakan berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar-mengajar yang efektif. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan santri memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai.
- d) Sumber; merupakan sumber atau resource yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, seperti buku, perangkat lunak komputer, televisi, proyektor, dan sebagainya.
- e) Evaluasi; merupakan penilaian tentang kemajuan belajar santri yang dilakukan oleh pendidik secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka.

2) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah santri dalam

mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah santri dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. (Rusman 2009:3) Pengorganisasian kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, yang di tulis oleh Rusman dalam Manajemen Kurikulum di antaranya:

- a) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran; dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek santri (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.
- b) Kontinuitas kurikulum; dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari santri, agar jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.
- c) Keseimbangan bahan pelajaran; dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan santri sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.

- d) Alokasi waktu; dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.

3) Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri.

Maka dalam hal ini, pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan dan menguji validasi kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu, gurulah kunci pemegang pelaksana dan keberhasilan kurikulum. Gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang sebenarnya.

Untuk itu, dalam mengelola implementasi kurikulum aspek kemampuan atau kompetensi guru perlu mendapat perhatian yang serius. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa: Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia

dini meliputi: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi professional; (3) kompetensi kepribadian; dan (4) kompetensi sosial. (Media 2005:19)

Memperhatikan masalah kompetensi seorang guru secara professional merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pesantren berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di pesantren - pesantren yang memiliki guru dengan kompetensi professional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan. Metode yang digunakan oleh seorang guru tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini yang menuntut santri aktif dan kreatif.

4) Evaluasi Kurikulum

Yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh aman santri telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) program. Dalam konteks pelaksanaan serta pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena dengan evaluasi akan dapat ditentukan nilai dan arti dari suatu kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak.

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi Tujuan Pendidikan; merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap tingkat perkembangan santri maupun ketercapaiannya dengan visi-misi lembaga pendidikan.
- b) Evaluasi terhadap Isi/Materi Kurikulum; merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran untuk mengetahui ketersesuaiannya dengan pengalaman, karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.
- c) Evaluasi terhadap Strategi Pembelajaran; merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.
- d) Evaluasi terhadap Program Penilaian; merupakan evaluasi terhadap program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran.

d. Model Implementasi

Ada beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh beberapa intelektual, yaitu :

1) Van Meter dan Van Horn Donald

Van Meter dan Carl Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variable kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan *standard*, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas. Model Karakteristik badan badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, social, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

2) Goggin, Bowman, dan Lester

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mempromosikan "model komunikasi" implementasi kebijakan dan menyebutnya sebagai generasi ketiga. Goggin, Bowman, dan Lester melihatnya senang mengikuti pemahaman Mazmanian dan Sabatier, karena para pakar tersebut menyebutkan tentang minat mereka untuk membuat implementasi kebijakan menjadi lebih ilmiah dengan menempatkan model penelitian dasar yang ditunjukkan dengan adanya variabel independen, variabel yang saling terkait, dan variabel dependen, dan menempatkan faktor komunikasi sebagai pembangkit implementasi kebijakan.

3) George Edward III

George Edward III mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama: komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari pihak yang terlibat. Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi frapmentasi birokrasi. (Nugroho 2015:219)

e. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi atau pelaksanaan kebijakan mengemukakan dua pertanyaan pokok:

- 1) Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil?
- 2) Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (*resources*), sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.

1) Komunikasi,

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi serta konsentrasi informasi yang disampaikan. Keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada sasaran sehingga akan dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Sumberdaya (*resource*),

Sumberdaya Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Meskipun isi telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka impiementasi tidak akan berjalan efektif.

3) Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi,

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbedabeda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan. (Subianto 2020:71)

Menurut Van Metter dan Van Horn tahapan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berhubungan. Variabel bebas tersebut:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
 - b) Sumber-sumber Kebijakan.
 - c) Ciri-ciri atau karakteristik Badan/Instansi Pelaksana.
 - d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatankegiatan pelaksanaan.
 - e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (lihat diagram).
- (Subianto 2020:71)

f. Prinsip Implementasi Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang menunjang tercapainya implementasi kurikulum, sebagaimana yang dikemukakan Hamalik berikut:

1) Perolehan kesempatan yang sama

Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2) Berpusat pada anak

Adanya upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Hal ini penting, agar peserta didik

mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Karenannya harus ada upaya pembelajaran yang disampaikan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta dengan penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

3) Pendekatan dan kemitraan

Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari Taman Kanak-kanak, kelas I hingga kelas XII. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Hal ini menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dunia kerja dan industri serta orang tua dan masyarakat.

4) Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan Standar kompetensi disusun oleh pusat, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau pesantren .

g. Konsep Dasar Kurikulum

Konsep dasar kurikulum, yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. (Zainuri 2018:14)

Menurut Sutrisno ada tiga konsep kurikulum, yaitu;

- 1) Kurikulum sebagai substansi Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi santri -santri di pesantren , atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan

masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu pesantren, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.

- 2) Kurikulum sebagai sistem; kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem per pesantren an, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.
- 3) Kurikulum sebagai bidang studi. kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. (Ahid 2006:14)

2. Pesantren Muaddalah

a. Pengertian Pesantren Muaddalah

Istilah pondok bersal dari Mua”adalah funduq yang berarti asrama atau tempat tinggal santri. Istilah pondok biasa dikenal di daerah Madura, sedangkan di daerah jawa istilah pondok dikenal dengan pesantren. Sementara di Aceh corak pendidikan seperti itu disebut dengan meunasah, dan di Sumatra Barat dikenal dengan istilah Surau. Adapun istilah pesantren secara etimologis berasal dari kata “santri” mendapat awalan pe dan akhiran an yang ber arti tempat tinggal para santri.

Imam Zarkasyi mengartikan bahwa pesantren yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok dimana kyai merupakan sosok sentralnya, masjid merupakan sentral kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran ajaran Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri merupakan kegiatan utamanya. (Krisdiyanto 2019:14)

Menurut Nur Komariyah Pondok pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan Islam non formal yang dikelola oleh seorang ulama atau kiai sebagai seorang pimpinan, ustad sebagai staf pengajar dan peserta didiknya disebut dengan santri. (Komariah 2016:2)

Secara etimologi, kata mu[‘]adalah berasal dari Mua[‘]adalah adalah adal-yu[‘]adilu-mu[‘]adalatan yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian mu[‘]adalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. (Wahib 2014:186)

Dapat kita pahami bahwa pesantren adalah Lembaga Pendidikan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh kyai dan peserta didiknya adalah santri yang disana mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pendidikan Islam menampilkan pendidikan yang berorientasikan keagamaan yakni pesantren salafiah yang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning klasik seperti nahwu, shorof, hadis, tasawuf, al-Qur'an dan lain-lain yang secara husus hanya mengajarkan agama. Tidak ada pesantren yang mengajarkan pengetahuan umum seperti pengetahuan tentang fisika, kimia terlebih pengetahuan tentang kesehatan seperti kebidanan atau entrepreneurship padahal agama islam adalah agama yang memberikan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan

ahirat. Dan induk dari berbagaimacam ilmu pengetahuan adalah al-Qur'an.

b. Tujuan Pesantren Mu'adalah

Diakui pesantren mu'adalah ini, tentu saja memiliki tujuan tersendiri, tujuannya diantaranya:

- 1) Untuk memberikan pengakuan terhadap sistem Pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan.
- 2) Untuk memperoleh gambaran kinerja pondok pesantren yang akan disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola Pendidikan pondok pesantren.
- 3) Untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan yang setara dengan Pendidikan formal MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA pada semua jenjang dengan kompetensi Pendidikan dasar dan menengah.
- 4) Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan yang setara dengan SMU/SMA.
- 5) Melindungi masyarakat dari akibat penyelenggaraan Pendidikan yang kurang bertanggungjawab.

c. Tipologi dan Kurikulum Pesantren Mu'adalah

Ada dua tipe satuan pendidikan pesantren mu'adalah yaitu satuan pendidikan mu'adalah salafiyah dengan kitab kuning sebagai basisnya, dan satuan pendidikan mu'adalah mu'allimin berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Dua tipe pesantren mu'adalah salafiyah dan mu'allimin.

1) Salafiyah

Dapat kita pahami dalam konteks historis adalah representasi dari role model pesantren yang berkembang bertahun-tahun lamanya di Indonesia. Tipe pesantren salafiyah yang memperoleh status

muadalah hingga tahun 2017 berjumlah 19 pondok pesantren, di antaranya adalah Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Pondok Pesantren Mathaliul Falah, Pati, Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, dan lain-lain.

2) **Mu'allimin**

Dalam pelaksanaannya pesantren yang mendapatkan pengakuan mu'adalah hingga tahun 2017 berjumlah 11 pondok pesantren, di antaranya adalah Pondok Modern Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan, Ponorogo, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Kuningan, Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta, Pondok Pesantren AlBasyariah, Bandung, Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Surakarta, dan lain-lain. (Muaddalah 2018:38)

Nama-nama pesantren di atas, baik salafiyah maupun mu'allimin, diakui atau tidak, adalah pesantren yang memiliki reputasi istimewa dalam khazanah historis perjalanan pesantren di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sebagai penggerak utama kiprah pondok pesantren di Indonesia. Konsistensi, kemandirian, dan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan membuat mereka mampu bertahan dengan pilihan sistem yang diyakini paling ideal. Pesantren-pesantren tersebut bisa dikatakan sebagai ikon dari implementasi pendidikan pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang indigenous.

Selanjutnya berkenaan dengan kurikulum ternyata beberapa pesantren yang mengikuti mu'adalah juga sudah memiliki kurikulum yang terumuskan dan tidak berlawanan dengan sistem pendidikan nasional. Limitasi kurikulum (dari segi bahan ajar) juga merupakan perwujudan dari spesialisasi pendidikan keagamaan Islam yang tentu saja menitik beratkan kepada materi ajar keagamaan Islam.

Kurikulum berbasis kitab kuning pada pesantren salafiyah meliputi berbagai kitab yang diajarkan dalam bentuk sorogan, wetonan dan bandongan. Untuk pengajian dalam bentuk sorogan, wetonan dan bandongan biasanya disebut sebagai kurikulum sistem ma'hady artinya jenis kitab, alokasi waktu pembelajaran dan kalender akademiknya sepenuhnya terserah sang Kiai. Adapun pengajian yang dikemas dalam bentuk klasikal atau system madrasy secara umum sama dengan model-model klasikal lainnya. Kitab-kitab yang dikaji biasanya sudah ringkasan dari kitab-kitab kuning yang ada. Materi kitab kuning itu sendiri meliputi tafsir alQur'an, hadits, ilmu tafsir, ilmu hadits, tauhid, akhlak/tasawuf, Mu'adalah /ilmu alat (nahwu shorof), fiqh, dan ushul fiqh.

Beberapa pesantren salafiyah juga memasukkan pelajaran umum secara tersurat dalam kurikulumnya, ini menunjukkan bahwa pesantren tidak alergi pendidikan umum, namun dalam penyajiannya berbeda dengan kebanyakan pelajaran di pesantren, namun semuanya terlihat menjadi lebih efektif karena beberapa unsur pendukung yang boleh dikatakan sebagai keunggulan pesantren.

Sedangkan kurikulum pada satuan mu'adalah muallimin umunya berakar pada tradisi pesantren dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu menjalankan peran kekhalifahan di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya sematamata kepada Allah dalam menjalankan peran tersebut. Salah satu yang menjadi fokus Pendidikan di pesantren adalah Pendidikan karakter. Pesantren juga menjadi salah satu tempat yang paling efektif untuk belajar ilmu keagamaan, karena lingkungan yang dimiliki cenderung lebih efektif daripada lingkungan rumah, karena di pesantren ada banyak peraturan yang mengarahkan santrinya untuk menunjang karakter dan keilmuannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pesantren memiliki model yang berbeda-beda, ada modern, salaf dan semi salaf. Hal ini dipengaruhi oleh materi kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan di suatu pesantren. Salah satu jenis pesantren adalah pesantren mu'adalah yang memiliki arti persamaan atau kesetaraan, sehingga statusnya disetarakan dengan pesantren

/ madrasah yang sesuai dengan tingkatannya. Pesantren mu^ʿadalah memiliki dua tipe. Tipe salafiyah atau yang biasa kita sebut dengan pesantren salaf dan muallimin atau yang biasa kita sebut dengan pesantren modern. Yang membedakan adalah kurikulum yang dimiliki oleh lembaga Pendidikan Islam atau pesantren dari Lembaga tersebut.

3. Kurikulum Muadalah

Setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia memiliki harapan besar terhadap pengembangan mutu dan kualitas pendidikan yang dikelola oleh pesantren dengan karakteristik dan ciri khasnya yang berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak baru bagi rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren sebagai salah satu model pendidikan Indonesia yang keberadaannya sudah banyak berkontribusi bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai penting dari Undang-Undang Pesantren ini tentu bukan sekadar aspek rekognisi dan pengakuan kesetaraan terhadap lulusan pesantren, melainkan juga menjadi bagian dari afirmasi dan fasilitasi pada dunia pesantren secara keseluruhan sehingga benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan pesantren di masa depan dalam menunjang ketercapaian (tercapainya) tujuan pendidikan nasional. Keberadaan Undang-Undang Pesantren ini tentu diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pemenuhan perkembangan zaman, pengakuan atas kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren, pengakuan akan varian karakteristik, model penyelenggaraan pendidikan, dan pengakuan pada pendidikan pesantren sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Eksistensi pesantren setelah terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan bagi aspek peraturan atau hukum untuk menjamin kesetimbangan kualitas lulusan, kesetaraan akses bagi lulusan, dan tentu kesetaraan bagi kesempatan di dunia kerja. Tidak kalah pentingnya juga yang berkaitan dengan pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menopang lulusan pendidikan pesantren. Jika

dilihat dari konteks pendidikan pesantren sebelum terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 ini, eksistensi pesantren cenderung terabaikan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan, pembiayaan, dan ketersediaan sarana-prasarana yang jauh dari rasa keadilan dibandingkan dengan pendidikan formal. Bahkan, lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren berjalan secara stagnan karena masalah pendanaan yang merupakan masalah klasik dalam peningkatan mutu pendidikan pesantren. Apalagi jika harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dari sisi pengelolaan, pembiayaan, dan sarana-prasarana lebih memadai dibandingkan dengan pendidikan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini, tentu menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan dalam menjamin ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pengelolaan pendidikan pesantren. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi landasan hukum untuk menegaskan kiprah dan kontribusi pesantren dalam pembangunan peradaban dan keumatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan pesantren merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan nasional tersebut, maka keberadaan pesantren sebagai bagian lembaga pendidikan di Indonesia, berupaya untuk berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas pesantren.

Nomor 18 Tahun 2014 adalah Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Salafiyah. Tujuan penyelenggaraan SPM Salafiyah adalah: 1. Membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah; 2. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan santri agar menjadi ahli

ilmu agama (*mutafaqqih fiddin*) dan menjadi pribadi muslim yang bisa mempraktikkan ajaran agama secara benar; 3. Membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan menjadi pribadi yang saleh secara individu dan sosial dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, persaudaraan, rendah hati, toleran, moderat, dan seimbang dalam menjalani hidup; dan 4. Memperoleh pengakuan atau rekognisi dengan satuan pendidikan formal sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tujuan pendidikan pesantren adalah berupaya mengantarkan santri untuk menjadi pribadi yang *tafaqquh fiddin* dan menjadi *anfa'uhum linnas* sebagai salah satu distingsi dari SPM Salafiyah. Distingsi dan eksistensi ini diperkuat melalui model pembelajaran berbasis kajian kitab kuning dan menekankan pada transmisi sanad. Berkaitan dengan itu, tujuan pendidikan SPM Salafiyah haruslah tetap dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyelaraskannya terhadap tujuan pendidikan nasional. Memadukan tujuan pendidikan SPM Salafiyah dan tujuan pendidikan nasional menjadi *conditio sine qua non* (tindakan, kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting) yang apabila diterjemahkan dalam tradisi pesantren menjadi kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (sesuatu yang menjadi lantaran tercapainya suatu kewajiban maka menjadi wajib).

Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah adalah pendidikan berbasis peasantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah (selanjutnya disingkat SPM Salafiyah) yang merupakan salah satu varian penyelenggara pendidikan formal di pesantren sudah barang tentu lebih menyadari tuntutan kewajiban dan tanggung jawab di atas. Untuk itu, SPM Salafiyah dalam dinamika perkembangannya sejak tahun 2003 telah mampu bergerak dan berkembang secara sentripetal dan sentrifugal. Secara sentripetal, SPM Salafiyah yang merupakan bagian dari gugusan pesantren-pesantren salafiyah bergerak ke

dalam memperkuat eksistensi dan kemandirian pesantren salafiyah yang secara historis dan etis berakar kuat di tengah masyarakat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu, peneliti telah memperoleh 3 judul Tesis dan 1 jurnal yang mempunyai kesamaan tema tentang Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan kurikulum pesantren. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu terkait dengan model pendidikan Islam dengan kurikulum berbasis pesantren untuk membangun karakter sholih akrom (studi kasus implementasi kurikulum pesantren di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Pati)

1. Penelitian tesis oleh Muhammad Luthfi Setiawan dengan judul "Internalisasi Nilai Dasar Sholih Akrom (NDSA) sebagai upaya Pembentukan Moral santri Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah". Penelitian ini memfokuskan pada Konsep NDSA, metode internalisasi NDSA antara IPMAFA Pati dan Ma'had Jami'ah, hasil internalisasi NDSA terhadap santri IPMAFA bahwa melalui peraturan-peraturan yang dibuat IPMAFA, dan evaluasi internalisasi NDSA terhadap santri IPMAFA didasarkan pada penilaian pada ranah kognitif dan afektif. (Setiawan 2019) Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas karakter sholih akrom, tetapi memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokus yang dipilih adalah Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, sedangkan lokus peneliti adalah madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Selain itu, fokus peneliti sebelumnya membahas internalisasi nilai dasar sholih akrom, sedangkan fokus yang akan dilakukan peneliti adalah pembentukan karakter sholih akrom yang dianalisis melalui kurikulum berbasis pesantren.
2. Penelitian tesis oleh Suja'i dengan judul "Pengembangan Budaya Mutu Di Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati". Penelitian memfokuskan pada pimpinan Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah, upaya yang ditempuh pimpinan dalam mencapai standar mutu, budaya mutu di madrasah Aliyah Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati. (Suja'i 2013)

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah, namun memiliki perbedaan dalam pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang budaya mutu yang dilakukan madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Adapun yang dilakukan peneliti adalah membahas kurikulum yang ada di madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah dalam membentuk karakter sholih akrom.

3. Penelitian tesis oleh Pujianto dengan judul "Model Pengembangan Pembelajaran Mua" adalah di Perguruan Islam Mathali'ul Falah KAJEN MARGOYOSO PATI" Penelitian membahas konsep pengembangan Mua" adalah, model yang diterapkan di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, faktor yang mempengaruhi pengembangan pembelajaran Mua" adalah dan dampak atau keberhasilan pengembangan pembelajaran Mua" adalah di Perguruan Islam Mathali'ul Falah. (Pujianto 2018) Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah, namun memiliki perbedaan dalam pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang model pengembangan pembelajaran Mua" adalah di Perguruan Islam Mathali'ul Falah KAJEN MARGOYOSO PATI, Adapun yang dilakukan peneliti adalah membahas kurikulum yang ada di madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah dalam membentuk karakter sholih akrom.
4. Penelitian oleh Mushollin dalam jurnal Nuansa, Vol. 11 No. 1 Januari – Desember 2014 dengan judul "Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah" Penelitian menganalisis manajemen kurikulum di pondok pesantren muadalah Al-Fitrah Kedinding Surabaya dan aspek differiansiasi kurikulum pesantren ini dibanding pesantren muadalah lainnya. (Mushollin 2014) Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pesantren yang melaksanakan kurikulum pesantren muadalah, tetapi memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokus yang dipilih adalah pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya, sedangkan lokus peneliti adalah madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Selain itu, fokus peneliti sebelumnya membahas manajemen kurikulum dan aspek differiansiasi

kurikulum pesantren, sedangkan fokus yang akan dilakukan peneliti adalah pembentukan karakter sholih akrom yang dianalisis melalui kurikulum berbasis pesantren.

